

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana dan kepastian hukum perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya Putusan Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn. Perkara tersebut melibatkan pihak swasta yang melakukan manipulasi dalam proses pengadaan mesin pengolah sampah di Kota Tanjungbalai, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara melebihi Rp1,5 miliar. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode studi perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), didukung oleh bahan hukum sekunder seperti jurnal akademik dan wawancara ahli, dan sumber tersier seperti kamus hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didukung oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga denda restitusi dengan mekanisme penegakan yang jelas, termasuk penyitaan dan pelelangan aset tertentu. Studi ini menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dalam melaksanakan penyitaan aset, terutama jika melibatkan kepemilikan pihak ketiga. Temuan ini berkontribusi untuk memperkuat pemahaman teoritis tentang asas legalitas, pemulihan aset, dan tanggung jawab pidana aktor non-negara dalam kasus korupsi. Studi ini juga menawarkan wawasan praktis bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memastikan penegakan hukum antikorupsi yang transparan dan efektif. Penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi proporsionalitas restitusi dalam kaitannya dengan total kerugian negara.

Kata Kunci: korupsi, hukum pidana, perampasan aset, kepastian hukum, putusan pengadilan.

Abstract

This study aims to examine the application of criminal law and legal certainty in asset confiscation related to corruption cases, with a specific focus on Decision Number 40/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mdn. The case involves a private party who manipulated the procurement process of waste processing machines in Tanjungbalai City, resulting in state financial losses exceeding IDR 1.5 billion. Using a normative juridical approach, the research applies statutory and case study methods to analyze legal norms, legislation, and jurisprudence. Data were collected through documentation of primary legal materials (statutes and court decisions), supported by secondary sources such as academic journals and expert interviews, and tertiary sources including legal dictionaries. The analysis shows that the defendant violated Article 2 paragraph (1) and Article 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, supported by Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP). The court imposed not only imprisonment but also restitution fines with a clear enforcement mechanism, including asset seizure and auction. This study highlights the importance of legal certainty in asset confiscation, especially when third-party ownership is involved. The findings contribute to a deeper theoretical understanding of the principle of legality, asset recovery, and the criminal liability of non-state actors in corruption cases. The study also offers practical insights for law enforcement and policymakers to ensure transparent and effective anti-corruption enforcement.

Keywords: corruption, criminal law, asset confiscation, legal certainty, court decision.

